

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Anggaran

Kinerja adalah perencanaan yang baik yang digunakan untuk mencapai tujuan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Pengukuran kinerja yaitu suatu proses evaluasi yang berhubungan dengan aktivitas, pemeriksaan berlanjut dan pelaporan pencapaian atas tindakan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Sistem anggaran yang memeriksa sebuah prestasi dan fokus pada *output* instansi yang berhubungan dengan tujuan dan rencana kerja pemerintahan merupakan pengertian dari Anggaran Berbasis Kinerja.

Penerapan sistem anggaran kinerja harus sesuai dengan program organisasi pemerintah karena pada saat instansi melakukan evaluasi pada kinerja *value for money* harus menerapkan secara efisien. Menurut Mardiasmo efisiensi terdapat dua bagian, yaitu: efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Perbandingan adanya sebuah keahlian dapat membuat sumber daya input yang berkaitan pada saat tingkat kapasitas ideal. Efisiensi ini berkaitan dengan kemampuan yang melibatkan sarana input pada tingkat *output* tertentu yang bertujuan sebagai media untuk mencapai kesejahteraan publik jika pelaksanaannya sesuai dengan ketelitian dan keberpihakan atas rakyat. Mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi adalah salah satu tujuan dari pengukuran *output* yang dikaitkan pada biaya. Pengukuran *output* merupakan media perantara untuk menjalankan akuntabilitas yang andal karena yang diterima publik merupakan

suatu keputusan dari prosedur pemerintah.

Anggaran yang melalui strategi kinerja layak untuk menolak anggaran tradisional sebab pemerintah akan menyalahgunakan kedudukannya dan melakukan ketakefisienan yang berhubungan dengan anggaran yang telah direncanakan. Strategi kinerja dominasi pemerintah bisa digerakkan oleh pemeriksa keuangan, dan pemeriksa kinerja melalui prosedur yang ditetapkan yaitu pemerintah harus dipaksa agar dapat bekerja berdasarkan *cost minded* (hemat biaya) memakai dana anggaran secara ekonomis untuk mencapai tujuan manajemen yang telah ditetapkan.

Di saat menyusun anggaran berbasis kinerja, organisasi atau unit organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun aturan atas dasar fungsi, strategi, aktivitas dan macam-macam biaya, tetapi juga merencanakan prestasi yang ingin diraih. Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk *output* dari aktivitas yang akan dilakukan dan hasil (*outcome*) berdasarkan strategi yang sudah diterapkan. Menurut Indra Bastian (2010 : 191) karakteristik suatu anggaran meliputi:

- a. Dinyatakan dalam satuan moneter, dan didukung dengan satuan nonmoneter seperti unit produksi dan unit terjual.
- b. Mencakup periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.
- c. Mengestimasi profit potensial dari suatu unit bisnis.
- d. Merupakan komitmen manajemen, artinya manajemen bertanggung jawab atas pencapaian tujuan yang telah dianggarkan.
- e. Usulan anggaran di review dan disetujui oleh orang yang berwenang.
- f. Pada saat anggaran telah disetujui, maka anggaran hanya bisa diubah karena

kondisi tertentu.

g. Melakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya secara berkala.

Menurut Sembiring dalam skripsi Decky (2014) menjelaskan maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah:

1. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*ouput*) dan dampak (*outcome*) atas alokasi belanja (*input*) yang ditetapkan,
2. Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran,
3. Program dan kegiatan disusun berdasarkan peraturan kementerian negara/lembaga.

2.1.2 Konsep *Value For Money*

Inti dari pengukuran kinerja di pemerintahan disebut dengan *Value for Money*. *Performance* pemerintahan tidak bisa diukur pada bagian *output* yang dihasilkan dengan cara mengontrol *input*, *output* dan *outcome* secara berdampingan. Perkembangan pada indikator kinerja bertumpu pada *software* dan pekerjaan atau yang dikenal dengan 3E. Ekonomis berarti hemat atau tepat guna, efisien adalah tepat atau sesuai, dan efektivitas merupakan sasaran dapat tercapai atas apa yang telah direncanakan.

Menurut Haryanto, dkk (2007) menjelaskan bahwa ketiga elemen tersebut belum cukup, dan ada penambahan dua elemen lagi yaitu: Keadilan (*equity*) dan kesetaraan. Pelayanan pada masyarakat yang berkualitas dan ketentraman terhadap ekonomi bisa didapatkan dengan adanya peluang sosial yang mengarah pada keadilan dan harus bisa menyalurkan secara merata (*equality*).

Secara garis besar implementasi evaluasi kinerja dengan konsep *Value for Money* dipilah menjadi 2 indikator kinerja meliputi: Indikator elemen aktivitas (kualitas pelayanan) dan indikator alokasi biaya. Menurut Mardiasmo dalam jurnal Nugrahani (2007), penerapan konsep *Value for Money* penting bagi pemerintah sebagai pelayanan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut akan memberi manfaat.

Implementasi konsep *Value For Money* dalam organisasi publik meliputi:

- a. Meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat yang tepat sasaran,
- b. Keunggulan terhadap pelayanan publik,
- c. Meminimalisir biaya pelayanan terhadap masyarakat agar tidak terjadi pemborosan pada anggaran dan melakukan penghematan dalam penggunaan barang dan jasa.
- d. Alokasi biaya yang lebih mengarah pada kebutuhan masyarakat, dan
- e. Meningkatkan kesadaran pada dana masyarakat (*public cost awareness*) yang dijadikan pilar pelaksanaan pertanggungjawaban masyarakat.

Ada empat langkah dalam pengukuran *Value for Money*, yaitu :

1. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi merupakan pengukuran yang relatif, pengukuran ekonomi yang hanya memantau atas masukan yang diperlukan.

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi menandakan sebuah pengurangan jumlah sumber daya yang bisa diterapkan pada konsep *Value for Money*. Rasio antara output dibanding input merupakan suatu cara yang dipakai untuk mengetahui dan menilai efisiensi.

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah sebuah metode pengukuran untuk melihat keberhasilan pada pemerintahan dalam meraih tujuannya. Organisasi tersebut dinyatakan sesuai jika telah mencapai tujuannya serta bisa diperoleh sebagai bahan keefektifan yang sudah dianggarkan.

4. Pengukuran *Outcome*

Perubahan pada sebuah rencana terhadap hasil akhir yang telah diraih lalu diberikan kepada rakyat disebut dengan *Outcome*. Jika *outcome* lebih tinggi nilainya daripada *output*, maka terdapat perubahan terhadap rakyat. Sedangkan *outcome* dipakai untuk mengukur kualitas *output* dan pengaruh yang diwujudkan. Pengukuran *outcome* memiliki dua tugas, yaitu tugas yang bersangkutan terhadap peristiwa yang telah terjadi (*retrospektif*) dan peran yang terkait dengan perencanaan kinerja yang dihasilkan (*propektif*).

Agar dapat menunjang pengelolaan anggaran masyarakat yang mendasar terhadap konsep *value for money*, maka membutuhkan sebuah metode pengendalian keuangan dan anggaran daerah yang mengarah kepada kinerja (*performance budget*). Untuk menunjang terwujudnya akuntansi publik daerah yang selaras dalam rangka otonomi dan desentralisasi bisa menggunakan dasar anggaran kinerja penilaian finansial tersebut. Selain penilaian finansial, terdapat penilaian non-finansial, yaitu suatu pendapat yang berkualitas pada pelayanan dengan mengawasi kualitas yang konsisten, seperti memenuhi ekspektasi pada sasaran yang akan dituju. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang diperlukan dan pelayanan yang ditempuh. Apabila pelayanan

yang ditempuh diperlukan, maka kualitas pelayanan yang dipresepsikan baik dan dapat dipenuhi. Penilaian kinerja sektor publik bisa dikerjakan dengan cara netral dan ideal, misalnya berhubungan dengan kemampuan beban dan keunggulan dalam servis yang sesuai dengan tujuan (*fitness for purposes*), dan konsisten dengan kepuasan publik (*public\ion*) yang ditunjukkan dengan rendahnya complain dari masyarakat.

2.1.3 Akuntabilitas

Pengelolaan anggaran selalu berkaitan dengan akuntabilitas publik. Akuntabilitas adalah sistem untuk menjaga kemampuan dan keefektifan bahkan melingkup sebuah presensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan seorang ahli politik dan pemimpin pemerintahan yang berhubungan dengan perbuatannya dalam menggunakan asset negara. Akuntansi kinerja merupakan komponen utama terwujudnya sebuah keunggulan instansi dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik.

Menurut Pieris dan Jim pengertian *Good corporate governance* (2008:131) yaitu: Partisipasi, hukum dan aturan, transparansi, *responsivitas*, akuntabilitas, orientasi konsensus, keadilan dan kewajaran, efisiensi dan efektivitas. *Good corporate governance* adalah aturan yang mengarahkan semua elemen perusahaan untuk berjalan secara bersama untuk mencapai tujuan perusahaan (Paramita, 2018). Konsep *Good Corporate Governance* berkembang seiring dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Ancaman ini adalah sebuah balasan dari masyarakat terhadap populernya masalah deviasi perusahaan internasional. Agar akuntabilitas

organisasinya dapat terpenuhi dan kinerja yang didapat sesuai maka pemerintahan diwajibkan berpedoman pada akuntabilitas yang sudah menjadi contoh yang tercantum dalam dasar hukum dan aturan.

Dalam melayani dan mengamati independent yang melaporkan mengenai laporan keuangan harus sesuai dengan kualitas pemerintah dapat diterapkan akuntabilitas publik yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010/(SAP), Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedangkan menurut Renyowijoyo (2010), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Ketika ada penyelewengan atau penyalahgunaan terhadap pelaporan pemerintahan, maka dasar pada akuntabilitas publik tidak pernah diterapkan dan akan mengakibatkan suatu pelaporan yang tidak diinginkan.

Dari penjelasan ini, pengertian akuntabilitas adalah suatu cara yang mampu memberikan pertanggungjawaban mengenai seluruh aktivitas dan performa yang sudah dilakukan oleh suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah sebuah keadaan seseorang yang mampu bertanggung jawab atas pengelolaan dana kepada kekuasaan tertinggi, misalnya divisi dinas mempunyai tanggung jawab terhadap pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntansi Horizontal

Akuntabilitas merupakan ide dari *stewardship*. *Stewardship* menentukan pengelolaan atas suatu tindakan secara ekonomis dan tepat waktu tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan sedangkan *accountability* menunjukkan pertanggungjawaban oleh seorang abdi (*steward*) kepada pemberi tanggung jawab. Tuntutan akuntabilitas publik lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal, tidak hanya akuntabilitas vertikal. Ancaman selanjutnya adalah membuat sebuah laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja sektor publik.

Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (Renyowijoyo, 2010), yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran Dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap

hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses adalah sebuah metode agar dapat mengetahui apakah prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas sudah cukup baik seperti kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses bisa terwujud melalui pemberian pelayanan masyarakat yang cepat, tanggap, serta biaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilaksanakan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya pembelian (*mark up*) dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelembaman dalam pelayanan.

3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program merupakan *software* untuk mengetahui pertimbangan pada tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan rakyat.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat atas segala aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang diberi wewenang oleh pemberi wewenang.

2.1.4 Transparansi

Selain prinsip akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk memajukan pengamatan terhadap suatu instansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Corporate Governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan diawasi. Dalam PP No. 71 Tahun 2010/SA, Transparansi berarti memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dapat dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi berarti penjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang bebas didapat, siap tersedia dan akurat yang berhubungan dengan pengelolaan rumah tangga di pemerintah daerah sehingga akan menyebabkan terciptanya pemerintahan daerah yang baik dan memikirkan kepentingan masyarakat. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu: salah

satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance*. Praktik *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses *stakeholder* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah dan masyarakat implementasi kebijakan mengurangi ketidakpastian dan dapat membantu menghambat korupsi di kalangan pejabat publik.

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses, pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Prinsip ini menekankan kepada dua aspek adalah:

- a. Komunikasi publik oleh pemerintah
- b. Hak masyarakat terhadap akses informasi

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut:

- 1). Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- 2). Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.

- 3). Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4). Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
- 5). Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi publik dipakai sebagai sebuah toleransi yang sangat intens, utuh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap strategi yang diterbitkan oleh penyelenggaraan negara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya, sehingga penelitian dapat membandingkan hasil dari penelitian terdahulu dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti. Berikut ini dikemukakan penelitian-penelitian tentang pengaruh kinerja anggaran berkonsep *value for money*:

1. Suryaningsih Loi (2015)

Judul penelitian pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*, hasil penelitian ini mengatakan Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* dan transparansi tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*.

2. I Desak Nyoman Tri Wandari , Edy Sujana, dan I Made Pradana Adi Putra (2015)

Dengan judul penelitian pengaruh akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*, dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*, akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

3. Aldiana (2016)

Dalam penelitiannya menyatakan bahwa Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep *Value for Money*. Karena Transparansi dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep *Value for Money*. Sedangkan Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran berkonsep *Value for Money*.

4. Aries Iswahyudi, Iwan Triyuwono dan M. Achsin (2016)

Dengan judul penelitian hubungan pemahaman akuntabilitas, transparansi, partisipasi, *value for money* dan *good governance*. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *good governance* tidak berjalan dengan baik, karena variabel akuntabilitas tidak berpengaruh secara positif. Sedangkan variabel partisipasi berpengaruh secara negatif dan variabel transparansi berpengaruh secara positif terhadap *good governance*.

5. Latifah Sinaga (2017)

Dengan judul pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Secara parsial variabel akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Sedangkan transparansi dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Variabel	Taknik Analisis	Hasil Penelitian
Loi (2015) Skripsi	Variabel Independen : Akuntabilitas Transparansi	- Uji Validitas - Uji Reabilitas - Uji Hipotesis - Uji Normalitas	Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> , dan transparansi tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> .
I Desak Nyoman Tri Wandari, Edy Sujana dan I Made Pradana Adi Putra (2015)	Variabel Independen : Akuntabilitas Transparansi Ketepatan Waktu Pengawasan	- Uji Multikolinieritas - Uji Hipotesis - Uji Normalitas	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> , transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> , ketepatan waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> , pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> , akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> .
Jurnal	Variabel Dependen : Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i>		

Aldiana (2016)	Variabel	- Uji Kualitas Instrumen dan Data	Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep <i>Value for Money</i> . Transparansi dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i> . Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran berkonsep <i>Value for Money</i> .
Skripsi	Independen : Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan	- Analisis Statistik Deskriptif - Uji Asumsi Klasik - Analisis Regresi Linier Berganda	
	Variabel Dependen : Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i>	- Uji Hipotesis	
Aries Iswahyudi, Iwan Triyuwono dan M. Achsin (2016)	Variabel	- Analisis Statistik Deskriptif - Analisis Regresi Linier Berganda - Uji Hipotesis	Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>good governance</i> tidak berjalan dengan baik, karena variabel akuntabilitas tidak berpengaruh secara positif. Sedangkan variabel partisipasi berpengaruh secara negative dan variabel transparansi berpengaruh secara positif terhadap <i>good governance</i> .
Jurnal	Variabel Dependen : <i>Good Governance</i>		
Latifah Sinaga (2017)	Variabel	- Uji Kualitas Instrumen dan Data	Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> . Secara parsial variabel akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
Skripsi	Independen : Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan	- Analisis Statistik Deskriptif - Uji Asumsi Klasik - Uji Hipotesis	
	Variabel Dependen : Kinerja Anggaran		

berkonsep
*Value for
Money*

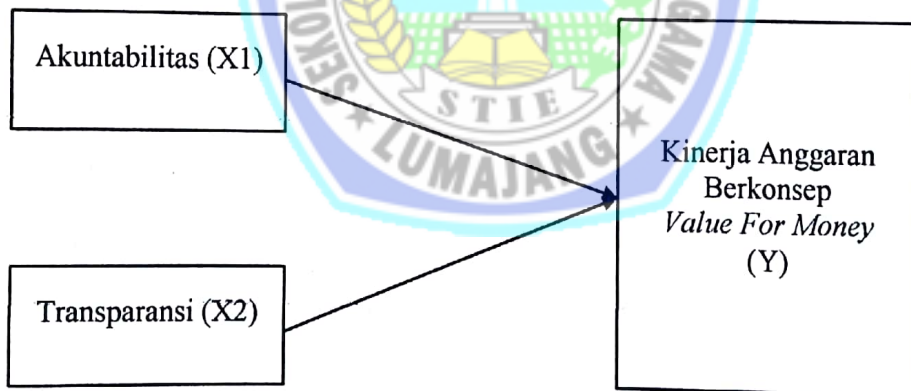
anggaran berkonsep
value for money.
Sedangkan transparansi
dan pengawasan
berpengaruh terhadap
kinerja anggaran
berkonsep *value for
money*.

Sumber: Data diolah peneliti 2021

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini tujuannya untuk memudahkan arah pola pikir secara singkat tentang suatu topik yang akan dibahas.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan suatu hubungan variabel melalui suatu kerangka konseptual penelitian dalam bagan berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
Sumber: Data diolah peneliti 2021

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money*

Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggung jawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan program. Dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik mengandung kewajiban untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati independent yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah.

Dengan menerapkan akuntabilitas yang kuat maka akan mempengaruhi instansi pemerintah untuk bekerja keras dalam mengelola anggaran andal sehingga dapat mencapai tujuan yang ditentukannya khususnya hasil akhi dari kinerja pemerintah yang harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Pemerintah yang menerapkan akuntabilitas dalam anggaran kinerja maupun laporan keuangan akan mengantarkan pemerintah menjadi lebih baik. Dalam penelitian terdahulu oleh Loi (2015) "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran berkonsep *Value for Money* pada Kota Medan" menyimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka penelitian menarik kesimpulan:

H1: Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value For Money*

2.4.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money*

Dalam PP No. 71 Tahun 2010/SA, “Transparansi berarti memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dapat dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Pengelolaan kinerja anggaran berkonsep *value for money* dalam pemerintahan sangat diperlukan transparansi karena sebagai alat pengawasan bagi pemerintah dalam mengelola anggaran dengan baik. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan struktur organisasi pemerintah harus sesuai dengan program organisasi pemerintah karena merupakan mencakup pada penentuan unit kerja yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian sangat diperlukan adanya transparansi dalam mengelola kinerja anggaran berkonsep *value for money* agar dapat menghindari KKN dan bisa mencapai tujuan dengan baik. Dalam penelitian Loi (2015) menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka penelitian menarik kesimpulan:

H2 : Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja

anggaran berkonsep *Value for Money*.

2.4.3 Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja

Anggaran Berkonsep *Value For Money*

Akuntabilitas dan transparansi adalah dua prinsip yang paling mendasar dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran di pemerintahan. Akuntabilitas dan transparansi secara konseptual saling berhubungan. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan kondisi saling mengawasi antara seluruh instansi pemerintah, dengan terlaksananya prinsip transparansi maka informasi mengenai penentuan kebijakan anggaran publik serta pelaksanaan anggaran kinerja akan terbuka. Dengan demikian proses pencapaian tujuan pemerintah secara 3 E akan dapat diawasi.

Dalam penelitian terdahulu Loi (2015) menyimpulkan bahwa Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu :

H3 : Akuntansi dan Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value For Money*.